

Pidato Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap ASEAN

oleh

Yang Mulia Bapak Toshimitsu Motegi,

Menteri Luar Negeri Jepang

“Menuju tahapan baru kerja sama dengan semangat Gotong-Royong”

Falsafah kebijakan luar negeri Jepang bersama ASEAN: “Diplomacy with a sense of caring and robustness”

Saya merasa terhormat atas kesempatan untuk menyampaikan pidato kebijakan luar negeri Jepang, yang saya lakukan untuk pertama kali di luar Jepang sebagai Menteri Luar Negeri, khususnya di gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta pada hari ini.

Untuk itu, saya ingin berterima kasih atas kerja sama dari Bapak Sekretaris Jenderal ASEAN dan banyak staf Sekretariat ASEAN.

Sebelumnya, saya juga ingin menyampaikan rasa bela sungkawa yang dalam atas musibah banjir yang menimpa Jakarta dan sekitarnya pada pergantian tahun 2019 menuju 2020 yang menelan korban jiwa serta mengakibatkan kerusakan yang parah.

Tepat 15 tahun yang lalu pada bulan Januari tahun 2005, wakil-wakil dari sebanyak 29 negara dan kawasan di seluruh dunia serta organisasi internasional telah berkumpul di Jakarta untuk menghadiri KTT Luar Biasa yang diprakarsai oleh ASEAN dalam rangka menghadapi tragedi besar yang melanda kawasan ini pada akhir tahun 2004, yakni gempa bumi dasyat lepas pantai Sumatera dan Tsunami Samudera Hindia.

Menghadapi terjadinya tsunami dan gempa tersebut, Jepang segera mengumumkan bantuan darurat senilai 500 juta USD, dan mengirimkan tim penyelamat darurat internasional serta satuan Pasukan Bela Diri Jepang dengan jumlah sekitar 2000 orang ke daerah terkena bencana. Hal tersebut menunjukkan pada dunia solidaritas Jepang dan ASEAN.

Tahun 2005 merupakan tahun dimulainya East Asia Summit (EAS) yang kini telah berkembang menjadi kerangka kerja sama utama di kawasan ini. Perjalanan EAS selama 15 tahun ini boleh dikatakan merupakan sebuah perjalanan sejarah untuk mencari bentuk kerja sama yang paling baik yang mampu menciptakan keuntungan yang adil bagi negara-negara di kawasan ini dengan ASEAN sebagai lokomotifnya.

Selama ini Jepang sebagai mitra setara bagi ASEAN, selalu mendukung sepenuhnya upaya-upaya ASEAN dalam mengembangkan EAS menjadi kerangka kerja sama utama di kawasan dengan sungguh-sungguh memikirkan bagaimana seharusnya Asia lalu memberi saran kepada ASEAN .

Saya selalu menjabarkan sikap dasar diplomasi Jepang saya sebagai Menteri Luar Negeri selaku sebuah falsafah yang saya sebut sebagai "*Diplomacy with a sense of caring and robustness*". Saya yakin bahwa hubungan Jepang dengan ASEAN dapat secara tepat menjelaskan sikap dasar ini.

Jepang senantiasa bersikap konsisten dalam memikirkan bersama apa yang harus dilakukan oleh ASEAN untuk perkembangan lebih lanjut dengan menghargai sejarah dan budaya yang telah dijaga oleh ASEAN yang memiliki keanekaragaman yang kaya seperti

sejarah, budaya, etnisitas dan agama, dan bukan dengan memaksakan pemikiran tertentu kepada ASEAN.

Pada tahun 2015, telah dinyatakan pembentukan Komunitas ASEAN dan disepakatinya “*ASEAN Vision 2025*” yang merupakan pedoman konkrit untuk mewujudkan komunitas tersebut. Tahun ini menandai setengah jalan dari 10 tahun pertama bagi Komunitas ASEAN, dan menjadi momentum besar menuju kesuksesan komunitas tersebut.

Oleh karena itu, pada hari ini saya ingin memaparkan apa yang dapat dilakukan oleh Jepang bersama ASEAN yang sedang menuju tahapan baru sebagai komunitas maupun hub kerja sama di kawasan dalam mencatat sejarah baru.

Sebelum masuk ke inti dari pidato saya, di sini saya ingin berbagi keprihatinan yang mendalam bersama semua pihak dari ASEAN atas ketegangan yang saat ini tengah terjadi di kawasan Timur Tengah. Jepang telah meminta semua pihak terkait untuk melaksanakan upaya diplomasi secara tuntas demi menurunnya ketegangan. Eskalasi situasi yang semakin tegang harus dicegah, oleh karenanya Jepang bekerja sama secara erat dengan negara-negara terkait termasuk ASEAN untuk terus melanjutkan upaya diplomasi guna menuju peredaan ketegangan serta kestabilan kondisi di kawasan Timur Tengah.

ASEAN sebagai hub di Indo-Pasifik

Kembali ke subyek pidato saya tentang kawasan ini, sebagaimana kita ketahui, dalam pertemuan KTT ASEAN pada bulan Juni tahun yang lalu, “*ASEAN Outlook on Indo-Pacific*” (AOIP) telah sepakat diadopsi. Jepang mendukung sepenuhnya prinsip yang dicantumkan dalam AOIP, sekaligus sungguh-sungguh mengapresiasi kepemimpinan

Indonesia dalam perumusan prinsip ini.

Mengapa Jepang mendukung AOIP? Sebagai alasan pertama karena gambaran Indo-Pasifik masa depan yang ditunjukkan dalam AOIP memiliki kesamaan dengan visi yang dianjurkan oleh Jepang.

Kawasan Indo-Pasifik merupakan pusat dinamika dunia dimana hampir separuh dari jumlah penduduk seluruh dunia bermukim di kawasan ini dan sekaligus merupakan kawasan di mana hubungan antar negara seringkali berubah drastis karena adanya persaingan kekuatan yang kompleks diantara beberapa negara.

Tatanan di kawasan Indo-Pasifik ini harus ditertibkan secara transparan oleh aturan yang jelas dan bukan oleh penggunaan kekuatan fisik secara sewenang-wenang agar kita dapat mewujudkan lingkungan sosial ekonomi yang stabil dan mampu diprediksi dengan baik sehingga kita dapat menikmati kesejahteraan di kawasan ini.

Khususnya, di laut dan perairan kawasan ini yang dapat dikatakan merupakan harta bersama dari seluruh masyarakat internasional, harus dipastikan bahwa setiap negara dapat melakukan aktivitas sesuai dengan prinsip dasar hukum laut internasional termasuk kebebasan bernavigasi, diakuiinya hak-hak mereka serta sengketa laut yang dapat diselesaikan secara damai. Dengan memastikan situasi seperti ini, kawasan ini baru dapat menikmati kemakmuran dalam arti yang sebenarnya sebagai hub perhubungan laut.

Hukum internasional masa kini adalah hasil dari kebijaksanaan yang telah dicapai manusia dengan keberhasilan mengatasi dua kali perang dunia untuk memastikan perdamaian, kestabilan dan kemakmuran di dunia. Penegakan hukum berdasarkan prinsip-

prinsip hukum internasional ini merupakan harga mati, mutlak esensial bagi konsep kawasan manapun. Saya ingin menekankan bahwa AOIP didukung oleh prinsip yang jelas dan tegas ini.

Selanjutnya, alasan kedua yang ingin saya tekankan adalah pentingnya sentralitas ASEAN yang telah membangun jaringan kerja sama multi-layer di kawasan seperti ASEAN+1, ASEAN+3, EAS dan ARF untuk perkembangan kawasan Indo-Pasifik secara keseluruhan.

Sejak zaman kuno, di tempat-tempat yang menjadi persimpangan jalur perhubungan, orang dan barang pasti berkembang sosial ekonomi yang sejahtera dan majemuk. Di kawasan Asia tenggara juga, telah dilakukan pertukaran dan perdagangan melalui laut yang bebas dan terbuka sejak 1500 tahun yang lalu. Itulah yang kemudian menjadi penggerak utama untuk membangun jaringan global dari Jepang di sebelah timur hingga Eropa dan Afrika di sebelah barat.

Berlatar belakang sejarah seperti ini, di tengah gelombang globalisasi yang sangat dinamis dalam beberapa tahun belakangan ini, sebuah jalan persimpangan raksasa yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta belahan bumi Utara dan Selatan semakin muncul bagaikan bintang Salib Selatan di langit. Kawasan yang terletak di jalan persimpangan ini adalah kawasan Asia Tenggara.

Dengan demikian, ASEAN telah ditakdirkan menjadi hub bagi kawasan Indo-Pasifik. Dalam AOIP bidang-bidang kerja sama termasuk kerja sama terkait konektivitas dan kemaritiman sesuai dengan peranan ASEAN telah dijelaskan secara gamblang.

Sementara itu, Jepang yang telah tumbuh sebagai negara maritim dan perdagangan juga tidak mungkin dapat menikmati kesejahteraan tanpa keberadaan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka serta terjadinya mobilitas berbagai orang, barang serta informasi yang dilakukan secara aktif. Jepang bertekad bulat untuk membangun bersama visi masa depan kawasan Indo-Pasifik dan tentunya ASEAN yang semakin meningkat kekuatannya sebagai hub di kawasan.

Tiga arah kebijakan baru ~kerja sama Jepang-ASEAN~

Saya ingin memperkenalkan tiga arah kebijakan Pemerintah Jepang mengenai bentuk kerja sama Jepang-ASEAN untuk mewujudkan visi masa depan ASEAN tersebut, yaitu, “**pemberdayaan manusia**” bersama, “**pembenahan kelembagaan**” bersama dan “**pengumpulan kearifan**” bersama.

(1) “Pemberdayaan manusia”

Yang pertama adalah “pemberdayaan manusia”. Hal yang menopang masyarakat yang sejahtera adalah kemampuan dan semangat yang dimiliki setiap orang.

Sebagai seorang politisi saya mengupayakan reformasi “pemberdayaan sumber daya manusia” atau SDM sebagai *life-work* saya. Di kota Ashikaga, Prefektur Tochigi, yang merupakan kampung saya, pernah berdiri “Sekolah Ashikaga”, salah satu lembaga pendidikan terkuno di Jepang yang merupakan situs peninggalan sejarah.

Sekolah ini memiliki skala dan mutu pendidikan yang sedemikian tinggi sehingga seorang misionaris dari *Society of Jesus* dari Eropa yang datang ke Jepang pada abad 16,

telah mencatat dengan rasa takjub bahwa “sekolah ini adalah akademi yang paling besar dan terkenal di Jepang.” Bisa jadi, oleh karena saya lahir dan dibesarkan di tempat yang memiliki latar belakang seperti itu, maka saya sampai memiliki perasaan yang kuat pada pendidikan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Barangkali, proyek Jepang yang paling dikenal di Indonesia di antara berbagai proyek pemberdayaan SDM adalah proyek kerja sama pemolisian masyarakat atau polmas. Jepang telah menjalankan berbagai kerja sama terhadap Indonesia selama sekitar 20 tahun untuk membangun polmas yang mampu menangani kejahatan umum secara independent terpisah dari TNI.

Dalam hal ini, di bawah program tahap baru yang dimulai pada tahun 2017 ini sebanyak 122 pelatih kepolisian di 17 provinsi, persis setengah dari seluruh provinsi di Indonesia telah dibina. Untuk ke depan diharapkan bahwa kegiatan Polmas akan dapat disebarluaskan di seluruh penjuru Indonesia oleh kepolisian Indonesia sendiri sebagai penggerak utama. Kepolisian Indonesia telah memperoleh pengetahuan dan pengalaman Jepang, sehingga sedang melangsungkan penataran untuk meningkatkan kapabilitas polmas di Timor-Leste. Dengan demikian boleh dikatakan bahwa kerja sama Jepang dan Indonesia telah memasuki tahapan baru, yaitu “pemberdayaan manusia bersama”.

Proyek kerja sama yang lain di Indonesia adalah kerja sama di bidang keamanan laut. Otoritas keamanan laut di Indonesia yang sebelumnya terpecah di beberapa instansi, saat ini telah terintegrasi dan terpadu di bawah komando dan instruksi dari otoritas tunggal, yaitu “Bakamla”. Pada tahun ini, Japan Coast Guard akan memulai proyek kerja sama yang ditujukan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait sistem pengelolaan kelembagaan dan penegakan hukum yang mereka miliki kepada “Bakamla” melalui

program penataran dan pengiriman ahli dari Jepang.

Jepang dan Indonesia adalah sesama negara kepulauan yang memiliki EEZ yang luas. Harapan saya ke depan adalah Bakamla mampu belajar dari akumulasi pengalamannya sendiri dalam hal penegakan hukum laut dan untuk kemudian Indonesia dapat membagikan pengalaman tersebut kepada Jepang sehingga akan dapat dimanfaatkan oleh kedua negara untuk bersama-sama memberdayakan generasi selanjutnya

Apa yang akan menjadi kunci utama di masa depan adalah pengembangan SDM berkualitas tinggi yang dapat menghadapi ekonomi digital dan kedatangan “revolusi industri 4.0.” Terkait hal ini, Jepang telah menyatakan “*Industrial Human Resources Development Cooperation Initiative 2.0*” pada saat KTT Jepang-ASEAN pada tahun 2018. Dalam Inisiatif ini telah ditetapkan target yang memberdayakan sebanyak 80 ribu SDM industri dalam 5 tahun ke depan hingga tahun 2023 dan upaya tersebut sedang dijalankan sesuai dengan jadwal

Satu hal yang tak kalah penting adalah upaya pengurangan “kesenjangan SDM” di kawasan. Untuk itu, tahun lalu Perjanjian tentang kerja sama teknis telah ditandatangani dengan ASEAN sebagai sebuah komunitas disamping adanya perjanjian dengan masing-masing negara anggota ASEAN sehingga sebuah kerangka pemberdayaan SDM untuk seluruh ASEAN telah dibangun. Dibawah kerangka perjanjian baru ini penataran tentang keamanan siber yang akan menjadi semakin penting di masa depan direncanakan akan dilaksanakan pada akhir bulan ini.

Sebagai contoh lagi untuk upaya mengurangi kesenjangan SDM, saya ingin

memperkenalkan “*Attachment Program*”, di mana pegawai negeri muda dari Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam diundang ke Sekretariat ASEAN untuk meningkatkan kemampuan kapasitas administrasi masing-masing. Duta Besar Kamboja Bapak Samnan yang turut hadir pada hari ini adalah alumni program ini. Saya yakin beliau adalah saksi hidup atas manfaat dan keunggulan program ini.

Program ini dilaksanakan dengan dana dari *Japan-ASEAN Integrated Fund* atau JAIF. Tujuan JAIF adalah mendukung ASEAN agar dapat mengurangi berbagai kesenjangan di kawasan ASEAN sehingga ASEAN dapat lebih terintegrasi sebagai sebuah komunitas_dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu saya merasa bangga karena *Attachment Program* ini betul-betul dilakukan sesuai dengan tujuan JAIF.

Sebagai negara Asia yang pertama kali berhasil mencapai modernisasi, Jepang sekaligus juga harus menjadi yang pertama di Asia dalam menghadapi perubahan struktural sosio-ekonomi yang baru seperti fenomena urbanisasi dan tantangan lingkungan hidup. Sekarang Jepang menghadapi tantangan besar di mana harus memberdayakan SDM berproduktivitas tinggi di tengah semakin pesatnya peningkatan jumlah penduduk usia lanjut menyusul turunnya angka kelahiran bayi.

Jepang bermaksud berbagi pengalaman yang akan diperoleh dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan negara-negara ASEAN. Dengan demikian, Jepang akan terus mendukung upaya ASEAN untuk memberdayakan SDM yang akan menopang masa depan.

(2) “Pembenahan kelembagaan”

Kedua adalah perlunya ada sistem sosial yang memungkinkan SDM yang telah dikembangkan dapat menunjukkan kemampuan yang dimiliki dengan baik.

Dalam hal ini, yang paling penting adalah perumusan aturan tentang kegiatan ekonomi. Sebelum menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, saya terus-menerus mengupayakan perumusan aturan ekonomi di tingkat regional maupun global sebagai Menteri Perekonomian, Perdagangan dan Industri dan Menteri Negara bidang Kebijakan Ekonomi dan Keuangan.

Antara lain, saya memimpin perundingan untuk mewujudkan CPTPP (pakta TPP11) serta perjanjian perdagangan Jepang-AS supaya dapat memberikan kontribusi pada perumusan aturan ekonomi yang bebas dan adil bagi masyarakat internasional. Pada saat ini, saya tengah melanjutkan upaya untuk mewujudkan RCEP yang diikuti oleh 16 negara anggota termasuk India dengan bekerja sama dengan negara-negara ASEAN. Selain itu, saya juga berupaya untuk membuat aturan terdepan termasuk aturan ekonomi digital untuk menjamin pemasaran data secara bebas sebagai kunci dalam ekonomi global di masa depan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perdagangan bebas merupakan sebuah sistem yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan mutu kehidupan satu sama lain dalam jangka waktu sedikit panjang. Sebagai contoh, nilai investasi dari Jepang kepada ASEAN mencapai 13 miliar USD pada tahun 2010 di mana *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement* diberlakukan pada semua negara peserta, dan Jepang menjadi investor terbesar kedua bagi ASEAN setelah Amerika Serikat. Namun, angka tersebut telah meningkat menjadi 21 milyar USD pada 2018, dan Jepang menempatkan diri pada peringkat nomor satu sebagai investor.

Selain itu, untuk merealisasikan ASEAN yang lebih dinamis, perlu untuk menjaga kemampuan dalam menanggapi dan mengkoordinir berbagai pendapat serta kepentingan dalam negeri yang berbeda melalui upaya pembenahan sistem politik yang demokratis.

Indonesia merupakan salah satu model dari pembangunan negara yang demokratis karena pengalamannya dalam pergantian pemerintah melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung dan bebas. Pengalaman ini juga telah dibagikan oleh Indonesia kepada negara-negara lain khususnya melalui Bali Democracy Forum.

Sejalan dengan itu, terdapat beberapa negara anggota ASEAN yang sedang menghadapi berbagai kesulitan dalam proses pembangunan negara demokratis. Jepang selalu bersikap untuk mengutamakan berpikir bersama dan berjalan bersama dengan negara-negara tersebut bagaimana menujumasyarakat yang lebih baik dan tidak memaksakan pemikiran tentang masyarakat yang ideal kepada negara-negara tersebut ataupun mengkritik ketimpangan-ketimpangan yang terjadi.

Jepang memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam upaya pembangunan rasa saling percaya antara pihak bersangkutan serta perbaikan situasi kemanusiaan secara terus-menerus. Misalnya, Jepang pernah mengundang politisi muda partai pemerintah maupun oposisi bersama dari Kamboja bersama ke Jepang untuk mempelajari proses demokratisasi di Jepang termasuk pemantauan pelaksanaan pemilihan umum. Di Myanamar juga, sambil menangani isu Rakhine, Jepang sedang bekerja sama untuk mendorong proses perdamaian di kawasan suku minoritas.

Ada suatu falsafah yang kuat di belakang upaya-upaya Jepang ini. Kami

berkeyakinan bahwa manusia baru dapat mempercayai orang lain dalam arti sesungguhnya apabila dia berhasil lolos dari ancaman kekerasan dan kemiskinan dan memperoleh martabat yang hakiki. Tanpa adanya rasa percaya seperti ini, perselisihan politik dan social tidak mungkin dapat diselesaikan secara esensial.

Jepang bertekad bulat akan berjalan bersama dengan ASEAN untuk menetapkan negara dan masyarakat yang beraneka ragam dan dinamis di kawasan berlandaskan rasa saling percaya melalui upaya-upaya jangka panjang berdasarkan keyakinan ini meskipun barangkali hal ini tidak mudah dan berliku-liku.

(3) “Pengumpulan kearifan”

Yang terakhir adalah mengenai pengumpulan kearifan. Di tengah semakin dikembangkannya SDM dan dimatangkannya sistem, apakah yang semestinya kita lakukan untuk menjadikannya kepentingan bersama bukan hanya bagi Jepang dan ASEAN, tapi bahkan bagi kawasan Indo-Pasifik serta seluruh masyarakat international? Untuk menjawab pertanyaan ini, apa yang ingin saya paling tekankan dalam pidato ini adalah supaya Jepang dan ASEAN dapat menjalin kerjasama dalam “mengumpulkan kearifan masing-masing” dan memperdalamnya demi tujuan yang sama.

Apa yang menjadi penopang bagi terbentuknya masyarakat yang bebas, adil dan penuh dinamis? Secara singkat, jawabannya adalah “memiliki alternatif”. “Self-Fulfillment” yang diinginkan seseorang baru dapat tercapai apabila ia mempunyai beberapa alternatif, baik pada pilihan kehidupan pribadi, pilihan strategi manajemen perusahaan maupun pada kebijakan negara. Apabila yang tersedia hanya satu pilihan saja, maka potensi dari perorangan, perusahaan atau negara tidak mungkin dikembangkan dengan baik.

ASEAN dan kawasan ini yang sangat majemuk dari berbagai aspek seperti etnisitas, budaya dan agama memiliki potensi besar untuk menciptakan berbagai pilihan. Dalam hubungan antara Jepang dan ASEAN, saya menegaskan bahwa upaya-upaya baru dan contoh praktek terbaik akan muncul bukan dari usulan sepihak Jepang kepada ASEAN melainkan dari kearifan ASEAN yang berlandaskan kemajemukan.

Terkait konteks “mengumpulkan kearifan”, saya teringat pada suatu hal yaitu program Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang terkenal di Indonesia. Buku kesehatan tersebut mulai disebarluaskan di Indonesia pada tahun 1994 dengan bantuan Jepang. Kemudian kami mendengar bahwa angka kematian ibu menurun secara drastis dari 446 orang pada saat itu menjadi 177 orang per 100 ribu orang. Demikian juga angka kematian bayi dari 84 orang turun menjadi 26 orang per seribu orang di Indonesia.

Mulai dari tahun 2018, Indonesia dan Jepang bekerja sama melaksanakan upaya baru untuk meningkatkan penyebaran buku kesehatan ibu dan anak di seluruh Indonesia melalui posko utama yang didirikan di tiap daerah. Berbeda dengan upaya Jepang yang cenderung melakukan penyebaran secara merata di seluruh pelosok Jepang, di Indonesia upaya tersebut dilaksanakan dengan menggunakan kearifan lokal Indonesia dimana penyebaran buku disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada dengan menetapkan posko di masing-masing daerah.

Dalam hal ini, tantangan paling signifikan yang telah diatasi oleh ASEAN dan Jepang dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman adalah penanggulangan bencana. Sekitar 30 persent gempa bumi bermagnitudo 6 atau lebih di seluruh dunia terjadi di kawasan dari Jepang hingga Filipina dan Indonesia.

ASEAN dan Jepang yang memiliki kesamaan ancaman bencana alam yang serius telah menguatkan peranan dan kapasitas *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management* atau AHA Center yang didirikan pada 2011 dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang penanganan bencana.

Kini AHA Center menjadi lembaga esensial yang diperlukan untuk upaya penanggulangan bencana alam di kawasan ASEAN, di samping itu, saya mendengar bahwa AHA Center menerima banyak permintaan untuk berbagi kearifan yang dimiliki dari organisasi bidang penanggulangan bencana di luar kawasan ASEAN.

Dalam hal penanganan sampah plastik di laut yang merupakan tantangan baru, ASEAN dan Jepang juga sudah mulai membangun hubungan “mengumpulkan kearifan.”

Jepang memiliki banyak pengalaman dalam penanggulangan sampah plastik di laut. Saya betul-betul mengharapkan bahwa penanggulangan sampah plastik di laut yang sungguh efektif akan terealisasi di kawasan ini dengan mengumpulkan dan mengkombinasikan informasi yang konkrit dari ASEAN tentang pola hidup masyarakat di masing-masing negara di ASEAN serta situasi lapangan terkait pembuangan dan pengolahan sampah plastik ke laut ditambah dengan pengalaman di Jepang.

Pada bulan Oktober tahun 2019, dibawah ERIA yang berkantor di Jakarta, Jepang telah mendirikan *Knowledge Center* yang diharapkan akan menjadi pusat pengumpulan data terkait isu sampah plastik laut sebagai tempat “mengumpulkan kearifan” dengan saling berbagi pengalaman mengenai praktek-praktek terkait penanganan sampah plastik yang telah dilakukan di masing-masing negara.

Mengingat bentuk pantai di kawasan ini yang sangat kompleks secara global maka diperlukan pengetahuan dan pengalaman yang tinggi serta kerja sama yang erat antara negara-negara di kawasan untuk melindungi lingkungan laut. Saya meyakini bahwa apabila ASEAN dan Jepang berhasil menemukan langkah-langkah yang efektif dengan menyumbangkan kearifan masing-masing dalam menghadapi kondisi geografis pantai masing-masing dengan kesulitan yang dimiliki, maka pengalaman yang dapat diperoleh akan menjadi referensi yang sangat berharga bagi kawasan-kawasan lain di dunia.

Metode ini akan berlaku pada kerja sama di bidang infrastruktur. Dalam kerja sama ini Jepang terus-menerus melakukan kerja sama jangka panjang agar senantiasa menciptakan lapangan kerja di negara setempat, memberdayakan SDM lokal dan menjadi lokomotif bagi perkebangangan ekonomi secara mandiri, bukan sekadar mengeluarkan dana dan membangun sarana-prasarana saja. Demikian juga kerja sama ini diharapkan mampu untuk berkontribusi pada pembentukan komunitas di daerah.

Dalam perjalanan ke tempat ini, saya naik MRT yang dibangun dengan kerja sama Jepang. MRT adalah contoh tipikal dalam kerja sama infrastuktur Jepang. *On time performance* atau kinerja ketepatan waktu operasi MRT yang dilakukan oleh orang Indonesia yang telah belajar *know-how* terkait pengelolaan kereta Jepang mencapai 99.8 percent. MRT juga memenuhi standar tahan bencana yang ketat dengan mengantisipasi bencana gempa bumi dan banjir. Selain itu, proyek ini tidak hanya membangun jalur kereta bawah tanah saja, tetapi juga berkontribusi untuk mengaktifkan seluruh kawasan Metropolitan Jakarta melalui upaya pembenahan jalur bis yang dihubungkan dan fasilitas *park-and-ride* di samping jalur dan stasiun MRT.

Untuk merealisasikan pembenahan infrastruktur yang berkualitas tinggi seperti ini, tidak cukup dengan hanya dana dan teknologi yang disediakan oleh pihak pemberi. Akan tetapi yang juga diperlukan adalah agar negara bersangkutan atau komunitas setempat yang bakal menggunakan dan merawat infrastruktur ini secara proaktif menyumbangkan ide-ide sesuai dengan situasi lapangan. Itulah premisi atau prasyarat dasar untuk merealisasikan infrastruktur yang berkualitas tinggi.

Dalam kesempatan hari ini, saya ingin mengumumkan bahwa Jepang berkeinginan untuk memobilisasi dana sebesar 3 miliar USD selama 3 tahun dalam periode 2020 ke 2022 baik dari sektor publik maupun swasta, sebagai dana kerja sama ekonomi yang “mengumpulkan kearifan” berdasarkan falsafah yang telah saya jelaskan sebelumnya. Antara lain, JICA bersedia untuk memberikan dana penanaman modal dan pinjaman sebesar 1.2 miliar USD.

Dengan semangat “Gotong-Royong”

Arah yang akan diambil oleh ASEAN yang terletak pada kawasan hub Indo-Pasifik akan mempengaruhi secara signifikan arah yang semestinya ditempuh oleh kawasan Indo-Pasifik secara keseluruhan. Jepang berkeyakinan bahwa adalah pilihan terbaik bagi ASEAN untuk menuju ke arah yang ditetapkan dalam AOIP.

Menjelang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Presiden Soekarno sebagai Bapak Pendiri bangsa Indonesia menyampaikan falsafah jiwa “gotong royong” yang merupakan gambaran Indonesia modern, yakni “pembantingan-tulang bersama”, “pemerasan-keringat bersama”, “perjuangan bantu-binantu bersama”. Sikap inilah yang dimiliki bersama oleh ASEAN dan Jepang.

Berpegang pada kata “gotong royong”, marilah kita jadikan tahun 2020 ini sebagai tahun pertama bagi ASEAN dan Jepang untuk mendorong kerja sama lebih lanjut menuju Indo-Pasifik yang bebas, terbuka dan sejahtera.

Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Terima kasih!